

Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Pohuwato

Fauzan Atjil¹ dan Gretty Syatriani Saleh²

1,2 Universitas Pohuwato

Email : grettysyatrianisaleh1@gmail.com

*Received: 04 Januari 2025; Revised: 20 Januari 2025; Accepted: 01 Februari 2025; Published:
Februari 2025; Available online: Februari 2025*

Abstract

This research aims to analyze the role of the Social Services Office of Pohuwato Regency in handling neglected elderly individuals. Neglected elderly are a vulnerable group facing various physical, health, social, and economic problems, often due to the absence of family, economic limitations, or poor family relationships. This study uses a qualitative approach focusing on the facilitative, educational, representational, and technical roles of the Social Services Office. The research findings indicate that the Social Services Office of Pohuwato Regency plays an active role in providing shelter, facilitating basic needs, offering education, advocacy, and managing data to ensure the well-being of neglected elderly. This role is crucial in fulfilling the basic rights and improving the quality of life for neglected elderly in the region.

Keywords: *Role, Social Services Office, Neglected Elderly, Handling, Pohuwato Regency*

Pendahuluan

Penuaan adalah proses alami yang tak terhindarkan bagi setiap individu, terutama manusia sebagai makhluk sosial. Seiring berjalananya waktu, ketika seseorang mencapai usia 60 tahun ke atas, yang seringkali disebut sebagai tahap lanjut usia (lansia), mereka cenderung mengalami penurunan fungsi fisik dan mental. Penurunan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari keterbatasan mobilitas hingga penurunan fungsi kognitif, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks masyarakat, terdapat sebuah fenomena yang memprihatinkan, yaitu keberadaan lansia yang hidup sendiri atau bahkan terlantar. Situasi ini bisa muncul karena beragam faktor yang kompleks. Beberapa lansia mungkin tidak memiliki anggota keluarga yang dapat merawat mereka, sementara yang lain mungkin memiliki keluarga namun dengan keterbatasan kemampuan ekonomi atau fisik untuk memberikan perawatan yang layak. Ironisnya, dalam beberapa kasus, fenomena ini juga mencerminkan pudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang

seharusnya menjadi pilar utama dalam merawat orang tua.

Penelantaran lansia bukan sekadar masalah individual, melainkan isu sosial yang kompleks dengan dampak berjenjang. Lansia yang terlantar sangat rentan terhadap berbagai masalah, termasuk kerentanan fisik dan kesehatan yang menurun, isolasi sosial yang mendalam, serta kesulitan ekonomi akibat ketidakmampuan untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Situasi ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang memadai, dan lingkungan yang aman, seperti yang diungkapkan oleh Lalenoh pada tahun 1993.

Merespons tantangan ini, Pemerintah Indonesia, melalui Dinas Sosial, mengembangkan tanggung jawab besar untuk menyediakan perlindungan sosial bagi seluruh warganya, termasuk kelompok lansia terlantar yang paling rentan. Amanat ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, terutama mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki dukungan keluarga. Peran Dinas Sosial menjadi krusial dalam menjembatani kebutuhan

lansia terlantar dengan sumber daya dan layanan yang tersedia.

Salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan ini adalah Kabupaten Pohuwato. Data pada tahun 2023 menunjukkan adanya 268 lansia terlantar yang tersebar di 13 kecamatan di kabupaten tersebut. Angka ini mengindikasikan skala masalah yang cukup signifikan dan menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Jumlah ini juga menunjukkan bahwa fenomena penelantaran lansia bukan hanya terjadi di perkotaan besar, tetapi juga di wilayah pedesaan atau kabupaten.

Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato telah berupaya mengklasifikasikan lansia terlantar berdasarkan kriteria tertentu untuk mempermudah penanganan. Kriteria tersebut mencakup lansia yang hidup sebatangkara dan berada dalam kondisi miskin, lansia yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai kelompok rentan, atau bahkan lansia yang memiliki keluarga namun kondisi ekonomi keluarganya tidak memungkinkan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka secara layak. Klasifikasi ini penting untuk memastikan

bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Sebagai langkah penanganan awal, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato berkoordinasi untuk menempatkan lansia terlantar yang mereka temukan di Panti Jompo Griya Jannatih Provinsi Gorontalo. Penempatan ini menjadi solusi sementara yang vital untuk memastikan lansia mendapatkan tempat tinggal yang layak, makanan, perawatan dasar, dan perlindungan dari kondisi lingkungan yang berbahaya. Meskipun bersifat sementara, upaya ini menunjukkan komitmen Dinas Sosial dalam memberikan respons cepat terhadap kasus-kasus penelantaran lansia.

Fenomena lansia terlantar di Kabupaten Pohuwato ini secara jelas menunjukkan urgensi dan signifikansi peran Dinas Sosial dalam memastikan kelompok lansia yang paling rentan ini mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Tanpa intervensi aktif dari Dinas Sosial, banyak lansia terlantar yang akan semakin terpuruk dalam lingkaran kemiskinan, penyakit, dan isolasi, sehingga kualitas hidup mereka semakin memburuk dan hak asasi mereka terabaikan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dalam menangani lanjut usia terlantar. Penelitian ini akan berfokus pada berbagai aspek peran Dinas Sosial, mulai dari identifikasi, penanganan awal, koordinasi, hingga upaya rehabilitasi dan reintegrasi, jika memungkinkan. Penggalian informasi mendalam ini diharapkan dapat mengungkap efektivitas program dan tantangan yang dihadapi.

Pada akhirnya, hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan rujukan teoritis yang kaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesejahteraan sosial, tetapi juga dapat memberikan rujukan praktis yang konkret dan aplikatif. Rujukan praktis ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat luas untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik, mengembangkan program penanganan yang lebih efektif, dan menginspirasi upaya serupa di masa mendatang, demi kesejahteraan lansia terlantar di seluruh Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan strategi

studi kasus, berpusat pada Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan kontekstual mengenai fenomena peran Dinas Sosial dalam menangani lanjut usia terlantar, dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang lebih berfokus pada pengukuran numerik. Dengan studi kasus, peneliti dapat menjelajahi kompleksitas interaksi, proses, dan interpretasi yang terjadi dalam praktik penanganan lansia terlantar di wilayah spesifik tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal melibatkan observasi pendahuluan untuk memahami dinamika umum dan tantangan yang dihadapi Dinas Sosial terkait lansia terlantar. Selanjutnya, studi literatur yang ekstensif akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi teoritis dan empiris relevan mengenai penanganan lansia, peran lembaga sosial, serta isu-isu terkait penelantaran. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di Bab I, metode pengumpulan data yang lebih mendalam kemungkinan besar mencakup wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, seperti

kepala dinas, kepala bidang, staf yang menangani lansia, serta pengelola panti jompo (Panti Jompo Griya Jannatih Provinsi Gorontalo) tempat lansia terlantar dari Pohuwato ditampung. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan strategi yang diterapkan dalam penanganan lansia terlantar.

Fokus utama analisis dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran-peran yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dalam konteks penanganan lansia terlantar. Kerangka konseptual yang digunakan bersandar pada teori peran, khususnya konsep peran fasilitatif, edukasi, representasional, dan teknis yang dikemukakan oleh Jim Ife (2008). Peran fasilitatif mencakup upaya memfasilitasi akses lansia terhadap berbagai kebutuhan dan layanan; peran edukasi berkaitan dengan penyediaan informasi dan peningkatan kesadaran; peran representasional melibatkan advokasi dan mewakili kepentingan lansia; sementara peran teknis meliputi aspek-aspek praktis dan manajerial dalam penanganan.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis

deskriptif ini akan memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang kaya dan detail mengenai bagaimana masing-masing peran yang diusung oleh Ife diimplementasikan dalam praktik nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato. Proses ini akan melibatkan identifikasi pola, tema, dan narasi yang muncul dari data, guna memberikan pemahaman komprehensif tentang efektivitas dan tantangan dalam implementasi peran Dinas Sosial demi kesejahteraan lanjut usia terlantar di wilayah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Peran Fasilitatif Dinas Sosial dalam Penanganan Lansia Terlantar

Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato memegang peran krusial sebagai fasilitator utama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia (lansia) terlantar. Peran ini adalah fondasi dari seluruh intervensi yang dilakukan, memastikan bahwa hak-hak dasar lansia seperti sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi. Penanganan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencari dan menjangkau lansia yang membutuhkan bantuan.

Observasi awal secara jelas menunjukkan manifestasi nyata dari

peran fasilitatif ini melalui penempatan lansia terlantar di Panti Jompo Griya Jannatih Provinsi Gorontalo. Tindakan ini merupakan langkah konkret yang diambil Dinas Sosial untuk memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi lansia, di mana kebutuhan sehari-hari mereka dapat terjamin. Panti jompo berfungsi sebagai wadah perlindungan yang esensial, tempat lansia dapat menerima perawatan dan perhatian yang mungkin tidak mereka dapatkan di lingkungan sebelumnya.

Lebih dari sekadar penyediaan fisik, peran fasilitatif juga mencakup animasi sosial. Ini berarti Dinas Sosial berupaya mendorong partisipasi aktif dari lansia terlantar dalam berbagai kegiatan sosial dan komunitas di panti jompo atau lingkungan sekitarnya, guna mencegah isolasi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mendorong interaksi sosial dan kegiatan rekreatif merupakan bagian integral dari upaya fasilitasi kesejahteraan emosional dan mental lansia.

Dalam konteks yang lebih luas, peran fasilitatif juga melibatkan mediasi dan negosiasi. Jika ada konflik antar penghuni panti atau antara lansia dengan pihak lain, Dinas Sosial berperan sebagai mediator untuk mencari solusi dan

mencapai kesepahaman. Kemampuan mediasi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung bagi lansia yang seringkali rentan terhadap masalah interpersonal.

Aspek dukungan juga merupakan elemen vital dari peran fasilitatif. Dinas Sosial tidak hanya menyediakan kebutuhan material, tetapi juga memberikan dukungan moral dan psikologis kepada lansia terlantar. Ini dapat berupa konseling, pendampingan, atau sekadar kehadiran yang menunjukkan empati dan perhatian. Dukungan ini esensial untuk membangun kembali kepercayaan diri dan rasa aman pada lansia yang mungkin telah mengalami trauma atau penolakan.

Terakhir, peran fasilitatif mencakup pembangunan konsensus, koordinator tim, pemanfaatan sumber daya, dan peran organisasi. Dinas Sosial berupaya menyatukan berbagai pihak (internal maupun eksternal) untuk mencapai tujuan bersama dalam penanganan lansia, mengorganisir upaya penanganan secara sistematis, mengidentifikasi serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, dan merencanakan tindakan yang terstruktur untuk memastikan

keberlanjutan layanan bagi lansia terlantar.

Peran Edukasi Dinas Sosial dalam Isu Lansia Terlantar

Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato mengembangkan peran edukasi yang signifikan dalam menangani isu lansia terlantar. Peran ini vital untuk meningkatkan kesadaran publik, menyebarkan informasi yang akurat, dan melatih berbagai pihak terkait agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan kebutuhan lansia yang rentan. Edukasi merupakan kunci untuk mengubah stigma dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Salah satu bentuk konkret dari peran edukasi adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepedulian terhadap lansia. Kampanye kesadaran publik dapat dilakukan di berbagai platform, mulai dari pertemuan komunitas, media lokal, hingga platform digital, untuk mengedukasi masyarakat tentang kerentanan lansia dan tanggung jawab kolektif untuk melindungi mereka. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab sosial.

Selain itu, Dinas Sosial juga bertanggung jawab untuk memberikan

penyuluhan tentang hak-hak lansia. Banyak lansia, terutama yang terlantar, mungkin tidak menyadari hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, seperti hak atas kesehatan, perlindungan hukum, dan jaminan sosial. Penyuluhan ini memberdayakan lansia dan keluarga mereka (jika ada) untuk menuntut hak-hak tersebut dari pemerintah atau lembaga terkait.

Pentingnya peran edukasi juga terlihat dari potensi pelatihan bagi keluarga atau komunitas yang merawat lansia. Ini bisa berupa pelatihan praktis tentang cara merawat lansia dengan kebutuhan khusus, teknik komunikasi yang efektif, atau manajemen stres bagi caregiver. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, keluarga atau komunitas dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan mencegah penelantaran.

Tujuan menyeluruh dari peran edukasi ini adalah agar baik lansia terlantar itu sendiri, maupun masyarakat di sekitarnya, menyadari pentingnya pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengetahuan ini bukan hanya tentang hak dan layanan, tetapi juga tentang kesehatan preventif, manajemen keuangan dasar, atau keterampilan hidup lainnya yang dapat

membantu lansia menjalani hidup yang lebih mandiri dan bermartabat.

Dengan melakukan edukasi secara berkelanjutan dan menyeluruh, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato berusaha menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan peduli terhadap lansia terlantar. Peran ini tidak hanya reaktif dalam menanggapi kasus yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mencegah penelantaran melalui peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat.

Peran Representasional Dinas Sosial untuk Lansia Terlantar

Peran representasional adalah salah satu fungsi penting yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dalam konteks penanganan lansia terlantar. Dalam peran ini, Dinas Sosial bertindak sebagai perwakilan atau juru bicara bagi kepentingan lansia terlantar, berinteraksi dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan kebutuhan mereka didengar.

Salah satu aspek krusial dari peran representasional adalah upaya memperoleh sumber daya eksternal. Dinas Sosial secara aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak

lain, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, maupun donor, untuk mendapatkan dukungan berupa dana, tenaga kerja, atau peluang program yang dapat dimanfaatkan untuk lansia terlantar. Ini menunjukkan kemampuan advokasi finansial dan sumber daya.

Selain itu, Dinas Sosial melakukan advokasi untuk membela hak-hak lansia terlantar. Advokasi ini bisa berupa lobi kebijakan kepada pembuat keputusan di tingkat daerah maupun nasional, atau bahkan pendampingan hukum jika lansia menghadapi masalah hukum. Peran ini memastikan bahwa suara lansia yang seringkali terpinggirkan dapat didengar dan hak-hak dasar mereka dihormati serta dilindungi.

Penggunaan media massa untuk publikasi dan sosialisasi masalah lansia terlantar juga merupakan bagian integral dari peran representasional. Melalui media, Dinas Sosial dapat meningkatkan visibilitas isu penelantaran lansia, menggalang dukungan publik, dan menekan pihak-pihak terkait untuk bertindak. Publikasi ini juga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi massal kepada masyarakat luas.

Membangun jaringan kerja dengan pihak lain adalah komponen vital dari peran ini. Dinas Sosial tidak bekerja sendiri; mereka berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya (misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan), LSM lokal maupun nasional, organisasi keagamaan, serta pelaku usaha. Jaringan kerja ini memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan praktik terbaik dalam penanganan lansia.

Terakhir, peran representasional juga mencakup berbagai pengetahuan dan pengalaman. Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dapat berbagi praktik baik (best practices) yang mereka terapkan dalam penanganan lansia terlantar dengan daerah lain atau lembaga serupa, sehingga dapat menginspirasi dan meningkatkan kapasitas penanganan lansia secara lebih luas. Ini juga menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan.

Peran Teknis Dinas Sosial dalam Penanganan Lansia Terlantar

Peran teknis Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato adalah aspek fundamental yang mendasari efektivitas seluruh upaya penanganan lansia terlantar. Peran ini berfokus pada

kemampuan dan kapasitas teknis lembaga dalam mengelola informasi dan merancang intervensi yang berbasis data. Tanpa peran teknis yang kuat, program-program yang dijalankan mungkin kurang tepat sasaran atau tidak efisien.

Salah satu inti dari peran teknis adalah kemampuan Dinas Sosial dalam mengumpulkan dan menganalisis data mengenai lansia terlantar. Proses ini meliputi identifikasi kasus, pengumpulan informasi demografi, kondisi kesehatan, latar belakang keluarga, serta kebutuhan spesifik masing-masing lansia. Pengumpulan data yang sistematis dan akurat merupakan langkah awal yang krusial.

Data yang terkumpul ini sangat penting untuk mengidentifikasi masalah secara lebih mendalam dan menilai kebutuhan lansia. Misalnya, data dapat menunjukkan pola penelantaran di wilayah tertentu, jenis masalah kesehatan yang paling umum, atau keterbatasan ekonomi yang dominan. Analisis data memungkinkan Dinas Sosial untuk memahami akar permasalahan dan memprioritaskan intervensi.

Berdasarkan analisis data yang komprehensif, Dinas Sosial dapat merancang program intervensi yang

tepat dan terukur. Data berfungsi sebagai dasar ilmiah untuk mengembangkan strategi penanganan yang relevan dengan kondisi aktual lansia terlantar di Kabupaten Pohuwato, bukan sekadar program yang bersifat umum. Ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya.

Selain itu, peran teknis juga mencakup memonitor dan mengevaluasi efektivitas penanganan yang telah dilakukan. Dengan data yang terstruktur, Dinas Sosial dapat melacak perkembangan lansia yang ditangani, mengukur dampak program, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Proses monitoring dan evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan hasil yang optimal.

Aspek penting lainnya dalam peran teknis adalah penggunaan teknologi informasi, seperti komputer, yang vital dalam mengelola data dan membuat laporan. Digitalisasi data memungkinkan penyimpanan yang lebih aman, akses yang lebih cepat, dan analisis yang lebih efisien. Kemampuan untuk menghasilkan laporan yang akurat dan terbarui secara rutin juga mendukung transparansi dan

akuntabilitas Dinas Sosial kepada publik dan pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato secara aktif menjalankan fungsi pokoknya dalam membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, termasuk penanganan lansia terlantar. Tindakan penempatan lansia di panti jompo, yang merupakan manifestasi dari peran fasilitatif, secara jelas mengindikasikan upaya nyata dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan ini, didukung oleh peran edukasi, representasional, dan teknis yang saling melengkapi.

Kesimpulan

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji peran Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dalam penanganan lanjut usia (lansia) terlantar, dengan menggunakan kerangka teori peran Ife (2008) yang mencakup peran fasilitatif, edukasi, representasional, dan teknis. Temuan menunjukkan bahwa Dinas Sosial secara aktif dan multifaset menjalankan peran-peran ini. Dalam peran fasilitatif, Dinas Sosial tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar melalui penempatan di panti jompo, tetapi juga mengupayakan animasi sosial, mediasi,

dukungan, dan koordinasi sumber daya. Ini mencerminkan komitmen nyata untuk memenuhi hak-hak dasar dan meningkatkan kualitas hidup lansia terlantar.

Peran edukasi Dinas Sosial sangat vital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak terkait mengenai isu-isu lansia terlantar, hak-hak mereka, serta pentingnya kepedulian. Melalui sosialisasi, penyuluhan, dan potensi pelatihan, Dinas Sosial berupaya membangun lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lansia, mencegah kasus penelantaran di masa mendatang, dan memberdayakan komunitas untuk turut serta dalam penanganan.

Dalam dimensi representasional, Dinas Sosial berperan sebagai advokat dan penghubung utama bagi lansia terlantar. Mereka aktif dalam memperoleh sumber daya eksternal, membela hak-hak lansia, menggunakan media massa untuk publikasi, serta membangun jaringan kerja yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan. Peran ini memastikan bahwa suara lansia yang rentan didengar dan kepentingan mereka terwakili di forum-forum pengambilan keputusan.

Terakhir, peran teknis Dinas Sosial, yang meliputi pengumpulan, analisis data, serta pemanfaatan teknologi informasi, menjadi fondasi rasional bagi seluruh intervensi. Kemampuan teknis ini memungkinkan Dinas Sosial untuk mengidentifikasi masalah secara akurat, merancang program intervensi yang tepat sasaran, serta memonitor dan mengevaluasi efektivitas penanganan. Integrasi keempat peran ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato menjalankan fungsi pokoknya secara holistik dan terencana dalam melindungi lansia terlantar

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan melibatkan kabupaten/kota lain yang juga menghadapi masalah lansia terlantar, guna mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan tantangan umum di berbagai konteks. Selain itu, penelitian masa depan dapat menggali lebih dalam efektivitas jangka panjang dari program-program penanganan yang ada, serta dampak partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam upaya perlindungan lansia terlantar. Fokus pada evaluasi dampak sosial-ekonomi dan psikologis

terhadap lansia pasca-penanganan juga akan sangat bermanfaat.

Daftar Pustaka

Ahmadi, Abu. (1982). Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

Ahmadi, Abu. (2007). Sosiologi Umum. Jakarta: Rineka Cipta.

Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1996). Role Theory: Concepts and Research

Florida: Robert E. Krieger Publishing Company.Dinsos. (2021).

Demartoto, Argyo. (2007). Sosiologi Keluarga. Surakarta: UNS Press.

Ife, Jim. (2008). Community Development in the 21st Century: New Challenges, New Approaches. Cambridge University Press.

Lalenoh, Tody. (1993). Penanganan Lanjut Usia Terlantar. Jakarta: Departemen Sosial RI.

Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Partini, Siti. (2011). Pengantar Sosiologi Lansia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. (2001). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sarlito, W. (2006). Psikologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Wulansari, R. (2011). Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.